

DINAMIKA ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN BANYUWANGI

Siti Nurhidayah¹, Triana Kartika Santi², Mahfud³

¹²³Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email : stnurhidayah09@gmail.com¹, trianasanti@untag-banyuwangi.ac.id²,
mahfud@untag-banyuwangi.ac.id³

ABSTRAK

Etnis Tionghoa yang ada di Banyuwangi adalah suku Hokkian yang berasal dari Fukien Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan mata pencaharian mereka yang rata - rata adalah berdagang, sesuai dengan asal daerah mereka yang sifat perdagangannya sangat kuat. Tujuan penelitian ini mengetahui dinamika suku Tionghoa di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan penelitian ini kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian terdapat pola interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi di Kelurahan Karangrejo agar usahanya bertahan dan mensejahterakan hidupnya dan keluarganya, sebagian besar etnis Tionghoa di Karangrejo menggantungkan hidupnya dalam sektor perdagangan. Di Kelurahan Karangrejo terdapat Klenteng tertua dan menyimpan sejarah panjang etnis Tionghoa maka sangatlah wajar jika mereka memilih untuk tetap berdomisili di wilayah tersebut. Masyarakat Tionghoa di Karangrejo pada umumnya sudah lancar berbahasa Jawa, dalam berkomunikasi dengan masyarakat pribumi bahkan dengan sesama Tionghoa sehari-hari sering menggunakan bahasa Jawa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi adanya perbedaan yang terdapat pada kedua individu atau kelompok sosial yang saling bersinggungan.

Kata Kunci : *Dinamika, Etnis Tionghoa*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama. Salah satu Etnis yang masuk dan berkembang di Indonesia adalah Etnis Tionghoa. Etnis ini mulai masuk ke Indonesia dimulai sejak tahun 413 M, dengan datangnya pendeta Budha yang bernama Fa Hsien ke Jawa. Secara historis Fa-Hsien adalah bangsa Etnis Tionghoa yang pertama kali menginjakkan kaki ke pulau Jawa (Justian, 2009).

Etnis Tionghoa tersebar di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya yakni di provinsi Jawa Timur. Kelompok Etnis Tionghoa mempunyai kebudayaan dan adat istiadat bahkan bahasanya pun sulit dimengerti oleh masing-masing suku, yaitu dari suku *Hokkian*, suku *Teo-Chiu*, suku *Hakka* (Kheh), suku Santung atau orang Kanton (Darajati, 2013). Orang-orang Hokkian adalah orang Tionghoa yang pertama kali bermukim di Indonesia dalam skala besar, dan mereka merupakan golongan terbesar di antara para imigran.

Etnis Tionghoa yang ada di Banyuwangi adalah suku Hokkian yang berasal dari Fukien Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan mata pencaharian mereka yang rata-rata adalah berdagang, sesuai dengan asal daerah mereka yang sifat perdagangannya sangat kuat. Kedatangan Etnis Tionghoa pertama kali ke Kabupaten Banyuwangi tercatat dalam sumber sejarah diperkirakan terjadi pada awal abad ke-14. Saat itu, pasukan Laksamana Cheng Ho melakukan perjalanan ke Majapahit dan Blambangan. Kedatangan pasukan Cheng Ho ke Blambangan pada tahun 1405 itu terjadi saat hubungan Kerajaan Blambangan (Kerajaan Timur) dan Majapahit (Kerajaan Barat) dilanda konflik. Masyarakat Etnis Tionghoa mulai menetap di Banyuwangi pada tahun 1631, mereka banyak memelihara sapi dan babi sebelum memiliki usaha dagang (Ningtyas, 2015:48)

Orang Tionghoa yang bermigrasi ke Pulau Jawa, datang secara perorangan atau dalam kelompok-kelompok kecil. Di Jawa yang memiliki kepadatan penduduk Tinggi orang Tionghoa biasanya akan kehilangan bahasanya setelah satu dua generasi karena Interaksi dengan Penduduk Lokal yang sangat Intens. Sehingga interaksi mereka dengan penduduk setempat sangat baik, karena penduduk sekitar juga tidak terlalu padat. Masyarakat pribumi disana bisa menerima komunitas-komunitas Tionghoa yang tetap berbahasa Mandarin dan seterusnya atau berbudaya Tionghoa (Onghkham, 2008: 2).

Kedatangan migrasi orang Tionghoa pertama kali ke Blambangan yang kini dikenal Banyuwangi yang tercatat dalam sumber sejarah diperkirakan terjadi pada abad 14 Masehi. Pasukan Laksamana Cheng Ho melakukan perjalanannya ke Majapahit dan Blambangan. Kedatangan pasukan Cheng Ho di Blambangan pada tahun 1405 itu terjadi saat hubungan kerajaan Blambangan (Kerajaan Timur) dan Majapahit (Kerajaan Barat) dilanda konflik, Groeneveldt (2009: 52). Setahun kemudian kedua raja Jawa tersebut saling berperang. Namun diperkirakan, Etnis Tionghoa mulai banyak bermigrasi ke Blambangan atau Banyuwangi dengan alasan untuk menyelamatkan diri pasca-pembantaian Etnis Tionghoa di Batavia pada 1740 dan berlanjut hingga tahun 1741. (Samsubur 2011: 215).

Pada tahun 1900 M orang-orang Etnis Tionghoa mulai mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk mereka. Pendidikan orang-orang Etnis Tionghoa semakin berkembang. Terlebih lagi Belanda membuat kebijakan terkait sistem pendidikan yang dipisah-pisahkan menurut golongan masyarakat sebagai berikut: a. *Hollands Indische School* (HIS) untuk orang-orang pribumi, b. *Hollands Chinese School* (HCS) untuk orang non pribumi keturunan Etnis Tionghoa, dan c. *Hollands Arabische School* (HAS) untuk keturunan Arab.

Kebijakan tersebut golongan pribumi semakin berprasangka buruk terhadap Etnis Tionghoa. Pendidikan bagi kaum pribumi pun hanya dapat dirasakan oleh keturunan bangsawan saja. Dalam bidang politik dan pemerintahan diadakan garis pemisah, yang mana jabatan-jabatan tertentu hanya diperuntukkan bagi orang-orang Etnis Tionghoa dan pribumi keturunan bangsawan. Sejarah seperti itu yang sering kita dengar di dalam dunia pendidikan kita. Terlalu sedikit hal yang diajarkan tentang

Sejarah Etnis Tionghoa dalam Pendidikan kita. Mengingat Orang Tionghoa merupakan bagian dari NKRI hal ini juga dapat kita kategorikan dalam suatu bentuk *diskriminasi* dan sangat berbahaya dan rawan memicu konflik antar suku dan ras, sehingga dapat menimbulkan perpecahan dalam bangsa ini.

Sejarah keberadaan Etnis Tionghoa di Banyuwangi sangat menarik untuk dikaji dari perjuangan dan perjalanan Bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Bukan hanya atas perjuangan warga pribumi, melainkan juga bantuan orang-orang Tionghoa yang juga memiliki rasa Nasionalisme terhadap tanah air Indonesia. Banyuwangi terkenal dengan kerukunan masyarakatnya menjadi salah satu wajah Pluralisme di Indonesia. Namun jika kita telisik lebih dalam sebenarnya masih ada berbagai permasalahan antara Etnis Pribumi dan Etnis Tionghoa yang disebut sebagai pendatang ini.

Kebudayaan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Etnis Tionghoa yang merupakan pendatang di Banyuwangi tentu memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda dengan warga lokal Banyuwangi. Kebudayaan yang mereka bawa dari negara asal mereka. Hal ini sangat menarik untuk diteliti dan dipelajari mengingat perbedaan budaya dan kebiasaan mereka yang berbeda namun Etnis Tionghoa dapat menyesuaikan keseharian mereka dengan masyarakat lokal. Etnis Tionghoa yang terkenal dengan keteguhan mereka dalam bekerja juga merupakan salah satu hal yang sangat berbeda dengan masyarakat asli Banyuwangi yang cenderung menerima keadaan dengan rasa Iklas, sering kali menjadikan Etnis Tionghoa mendapat predikat sebagai orang pelit di masyarakat. Pandangan seperti itu juga perlu kita luruskan dengan mempelajari berbagai aspek kehidupan mereka terlebih dahulu, meskipun sering mendapat predikat “pelit” dari masyarakat lokal, namun jika kita pelajari tentang Etnis Tionghoa, maka kita dapat melihat bahwa sebenarnya masyarakat dari kalangan Etnis Tionghoa merupakan orang-orang yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang sangat tinggi serta mereka juga sering kali memperhitungkan dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan sangat matang dan terperinci (*detail*) hingga ke dalam suatu hal yang kita anggap kecil atau sepele.

Banyak hal yang sangat menarik untuk mengetahui dinamika Etnis Tionghoa di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi agar kita dapat memahami tentang Etnis Tionghoa yang hidup berdampingan di sekitar kita sejak dini, untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan sebagai sebuah Bangsa yang besar.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang artinya penelitian ini menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun sumber data adalah Ketua TITD (Tempat Ibadah Tri Darma) Hong Tong Byo Karangrejo Banyuwangi, Warga Etnis Tionghoa Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yakni : reduksi data, menampilkan data dan penarikan kesimpulan dan Verifikasi.

PEMBAHASAN

Perkembangan Etnis Tionghoa di Banyuwangi

Pada awal kedatangannya yang merupakan upaya pelarian dan akhirnya menjadi penduduk pribumi di tanah Blambangan atau yang sekarang dikenal sebagai Banyuwangi Etnis Tionghoa mulai menguasai sektor perniagaan di Banyuwangi, terbukti dengan mayoritas pedagang yang menguasai sektor-sektor sentral seperti bahan bangunan dan sembako, hingga sektor pertambangan dikuasai oleh etnis Tionghoa.

Namun untuk menjadi seperti saat ini banyak sekali rintangan dan halangan yang harus mereka lalui, bahkan kecemburuan sosial dari masyarakat asli tanah Blambangan ini masih sangat terasa hingga sekarang, Etnis Tionghoa yang hidup makmur di Banyuwangi masih dianggap sebagai penjajah dan belum diterima sepenuhnya sebagai penduduk lokal Banyuwangi. Kesuksesan yang mereka raih bukan semata mata secara kebetulan, mereka membangun bisnis dari awal, dengan kerja keras dan penuh dedikasi dalam menjalankan usaha mereka berjuang dari keterpurukan.

Ketua Tempat Ibadah Tri Dharma Banyuwangi periode 2009-2014, mengatakan, kebijakan Orde Baru tersebut juga berdampak serius terhadap kehidupan sosial dan budaya klinteng Hoo Tong Bio. Kegiatan-kegiatan di klinteng mendapatkan pengawasan dari Pelaksana Khusus (Laksus) Daerah Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Kobkamtib adalah organisasi pusat yang langsung berada di bawah komando Presiden RI yang pada saat itu merupakan era Jenderal Soeharto dan didirikan pada tanggal 10 Oktober 1965. Kobkamtib didirikan segera setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Bisa dikatakan lembaga tersebut merupakan jantung kekuasaan Orde Baru yang mengkoordinasi sejumlah badan intelejen, mulai dari BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) sampai dengan intelejen dalam setiap bagian ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Prinsip jabatan rangkap dalam organisasi diperluas keseluruh jajaran Kopkamtib, mulai dari pusat, daerah, hingga distrik dan rayon. Wakil utama Kopkamtib adalah Panglima Komando Daerah Militer yang merangkap sebagai Pelaksana Khusus daerah (Laksusda). Fungsi Laksusda adalah melaksanakan kebijakan Panglima Kopkamtib, walaupun ia juga menerima perintah dari Presiden melalui Pangab. Sejauh yang diketahui, seluruh Pangdam juga bertindak sebagai Laksusda. Laksusda dibantu oleh staf kodam.

Meski Laksusda tidak melakukan penjagaan langsung di klinteng, namun anggotanya sering berpatroli di depan kelenteng. Penjagaan juga dilakukan ketika

klenteng menggelar perayaan hari besar keagamaan. Situasi yang tidak nyaman itu membuat umat Tri Dharma di Klenteng Hoo Tong Bio tidak lagi bebas melaksanakan ibadahnya. Sebagian besar dari mereka memilih beribadah diam-diam untuk menghindari rombongan Laksus. Demikian juga perayaan hari keagamaan seperti Imlek dan Cap Go Meh tidak lagi digelar secara meriah. Perayaan hanya berupa sembayang bersama yang ditutup dengan acara makan-makan. Seluruh pesta hanya boleh dilangsungkan di dalam tembok klenteng, tidak boleh dirayakan berkeliling kota.

Ketua Bidang Agama TITD Hoo Tong Bio mengatakan, penampilan kesenian barongsai dan liang-liong terakhir kali dilaksanakan pada tahun 1971. Namun setelah tahun 1971 kesenian tersebut tak boleh lagi ditampilkan dalam perayaan – perayaan atau keagamaan keagamaan. Selain dilarang keras, kesenian Barongsai harus kehilangan banyak pemain karena senimannya sebagian besar tidak aktif lagi ke klenteng Hong Tong Bio.

Diskriminasi yang diterima mengakibatkan banyak umat Tri Dharma memutuskan untuk berpindah agama baik ke Islam, Kristen, dan Katolik. Situasi politik yang tidak berpihak pada etnis Tionghoa saat itu juga dimanfaatkan sekelompok orang untuk menarik orang Tionghoa berpindah agama. Sebagian besar memilih agama Katolik, namun tidak ada data pasti berapa umat Tri Dharma yang berpindah agama. Namun eksodus itu terlihat dari jumlah umat yang beraktivitas di klenteng semakin turun dari tahun ke tahun semasa periode Orde Baru. Hal tersebut sangatlah wajar karena tidak semua orang Tionghoa tahan untuk menghadapi *diskriminasi* dan *Interfensi* para pemegang kekuasaan kala itu. Dengan berpindah agama, dianggap sebagai jalan pintas supaya terbebas dari *diskriminasi*.

Salah satu warga Tionghoa mengatakan orang tuanya adalah penganut Tri Dharma. Namun selama Orde Baru berkuasa, orang tuanya memilih vakum pergi ke klenteng karena tidak nyaman selalu diawasi oleh militer. Meski tidak ada ancaman langsung, namun ketakutan terhadap pembantaian orang Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965-1966 akhirnya membuat orang tuanya enggan pergi sembahyang. Bahkan untuk menghindari kesulitan, kakek-neneknya saat meninggal akhirnya terpaksa dimakamkan dengan cara Katolik meski sebenarnya mereka penganut Tri Dharma. Warga tersebut juga bercerita, dia tumbuh sebagai penganut Katolik. Karena saat Orde Baru orang tuanya memasukkannya bersama empat saudaranya ke sekolah Katolik. Sehingga akhirnya keluarganya saat ini tumbuh sebagai penganut Katolik. Saat itu, Katolik dipilih karena agama ini membolehkan umatnya memegang *yoshua* atau dupa yang merupakan tradisi Tionghoa.

Kecenderungan orang Tionghoa lebih memilih ke Katolik karena agama tersebut memberikan ruang bagi orang Tionghoa untuk tetap bisa melaksanakan kepercayaan tradisionalnya yakni penghormatan terhadap leluhur. Menurut Hidajat (1977), dalam dokumen *Plane Compertum Est* tertanggal 8 Desember 1939 yang dikeluarkan oleh the *Roman Congregation of Propaganda Fide* (sekarang disebut the *Congregation for the Evangelization of Peoples*), umat Katolik Tionghoa dapat melakukan doa menghormati

Confusius dan leluhur dengan ritus Tionghoa, karena muatan religius ritus tersebut sudah disekularitaskan sehingga dapat dianggap sebagai perayaan kenegaraan saja. Penghormatan kepada leluhur sendiri tidak bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik, yang memang mengajarkan agar perbuatan belas kasih tidak hanya terbatas pada sesama yang masih hidup di dunia ini. Melainkan juga kepada mereka yang sudah mendahului manusia beralih dari dunia ini, terutama orang tua dan kerabat, yang ditunjukkan dengan menguburkan mereka dan mendoakan bagi keselamatan jiwa mereka, khususnya dalam Misa Kudus.

Kepala kantor Klenteng Hoo Tong Bio, bercerita setelah sekolah Tionghoa ditutup pada tahun 1967, komunitas Tionghoa tidak punya pilihan lain untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Enggan berurusan dengan sekolah negeri, para orang tua pun terpaksa menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta yang berlatar belakang agama Katolik, mulai jenjang SD, SMP dan SMA. Sekolah yang banyak menjadi pilihan adalah SD Katolik Santa Maria, SMP Katolik Santo Yusuf dan SMA Katolik Banyuwangi.

Beliau memiliki tiga anak, dua di antaranya memeluk agama Katolik dan satu orang memilih Buddha. Menurutnya, kedua anaknya memilih Katolik karena semenjak kanak-kanak masuk sekolah Katolik. Setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai, siswa diajarkan untuk bersembahyang di gereja, sehingga lingkungan Katolik telah melekat di kehidupan anak-anaknya. Ong sendiri memberi kebebasan ketiga anaknya untuk memilih agama. Terlebih lagi pada masa Orde Baru, dia tak bisa lagi memaksakan anak-anaknya untuk memeluk Kong Hu Cu seperti dirinya. Selama pemerintahan Orde Baru itu, Ong sendiri akhirnya mempelajari agama Buddha. Namun ia jarang pergi ke kelenteng, sebulan hanya dua kali yakni pada sembayang tanggal 1 dan sembayang tanggal 15. Selain sembayang, dia sendiri tidak aktif pada kegiatan-kegiatan klenteng, karena hidup orang Tionghoa sangat susah selama Orba. Sehingga orang Tionghoa seperti dirinya yang hanya sebagai pelatih basket tidak pernah memikirkan kepentingan umat di klenteng.

Menurut beliau sebagian besar umat kelenteng terpaksa mengikuti kebijakan Pemerintah Orde Baru. Organisasi militer seperti Laksusda saat itu punya otoritas untuk menghukum seseorang yang diduga membahayakan negara, bahkan lembaga ini punya kewenangan menentukan hidup dan matinya seseorang. Karena itu, orang Tionghoa saat itu tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti seluruh aturan yang diterbitkan.

Kehidupan sosial dan budaya etnis Cina akhirnya mengalami kebebasan setelah Orde Baru runtuh dan digantikan Orde Reformasi yang berlangsung hingga kini. Orde Reformasi di tahun 1998 menjadi momentum penting dalam membangkitkan semangat spiritual sosial dan budaya etnis Tionghoa di Indonesia. Bergantinya tampuk pemerintahan dari Soeharto ke B.J Habibie masih belum menunjukkan perubahan signifikan terkait hak kebebasan orang Tionghoa. Baru setelah Abdurrahman Wahid naik menjadi presiden pada tahun 1999-2001, Inpres nomor 14 tahun 1967 dihapus dan diganti dengan Keppres no. 6 tahun 2000 (Liem, 2000: 9-10).

Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya). Baru pada tahun 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri mulai tahun 2003.

Selama Orde Baru, umat Tri Dharma tidak bisa mengekspresikan aktivitas sosial dan budayanya. Oleh karena itu, sepanjang 32 tahun Orde baru berkuasa, Klenteng Hoo Tong Bio hanya menjadi tempat ibadah dan tempat berkumpulnya pemeluk Tri Dharma yang masih berpegang teguh dengan kepercayaan tradisional mereka. Menurut Ketua TITD Hoo Tong Bio, Bambang Witarsa, perjumpaan dengan umat Tri Dharma di klenteng selama Orde Baru, menjadi media untuk saling memperkuat diri dengan sesama. Saat itu, tidak ada pilihan lain bagi umat Tionghoa selain mengikuti seluruh kebijakan pemerintah demi bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, umat Tri Dharma yang bertahan dengan kepercayaannya, tak bisa berbuat lebih ketika menjumpai kenyataan banyak jamaahnya yang berpindah agama. Kegiatan budaya juga berhenti karena dilarang oleh pemerintah.

Hal Yang Mendasari Etnis Tionghoa Memilih Tetap Tinggal di Kelurahan Karangrejo

Di Kelurahan Karangrejo terdapat Klenteng tertua dan menyimpan sejarah panjang etnis Tionghoa maka sangatlah wajar jika mereka memilih untuk tetap berdomisili di wilayah tersebut, Namun jika kita teliti lebih dalam lagi ada banyak faktor yang mendasari keputusan tersebut, antara lain adalah :alasan tempat kelahiran karena mayotitas tinggal di kelurahan Karangrejo, alasan ekonomi daerah ini salah satu pusat perdagangan, Masyarakat Etnis Tionghoa yang hidup membaaur sudah sejak lama dengan masyarakat sekitar tentu juga memiliki rasa persaudaraan yg kuat,

- Alasan Tempat kelahiran

Tidak bisa dipungkiri bahwa tempat kelahiran merupakan suatu hal yang spesial bagi setiap individu, siapapun dan kapanpun pasti memiliki rasa terikat dengan tempat kelahiran mereka, Etnis Tionghoa yang tinggal di wilayah Kelurahan Karangrejo juga mayoritas bahkan hampir semuanya dilahirkan di wilayah tersebut, hal itu menjadikan mereka sangat terikat dengan wilayah ini.

- Alasan Ekonomi

Karangrejo yang merupakan salah satu pusat perdagangan di kota banyuwangi menjadikanya sebagai tempat berdagang yang memiliki prokpek ekonomi yang bagus. Selain kemampuan berdagang Etnis Tionghoa yang sangat bagus, keuletan mereka dalam berdagang dan menguasai pasar bukanlah hal baru bagi dunia ini, ruko-ruko di wilayah karangrejo juga mayoritas dimiliki oleh orang Tionghoa yang tinggal di wilayah tersebut dan menjakanya Cina Town di wilayah Kota Banyuwangi, hal tersebut juga menjadi alasan tersendiri bagi Etnis Tionghoa Karangrejo untuk tetap tinggal.

- **Rasa Persaudaraan**

Masyarakat Etnis Tionghoa yang hidup membaaur sudah sejak lama dengan masyarakat sekitar tentu juga memiliki rasa persaudaraan yg kuat, berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari semakin mempererat rasa persaudaraan mereka, tentu hal ini sangat berarti bagi siapapun, dan tentunya ingin tetap mempertahankan hal itu. Hal seperti itu tentu adalah sesuatu yang sangat wajar karena kodrat manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan lepas dari manusia lain. Namun hal seperti itu bisa menjadi lebih mendalam dan berarti bagi Etnis Tionghoa karena tidak bisa dipungkiri bahwa Etnis Tionghoa merupakan kaum minoritas yang sering dikucilkan dan sering mendapat diskriminasi, mendapat perlakuan yang setara dan dianggap sebagai teman, sahabat, bahkan saudara dari kaum mayoritas merupakan sebuah hal yang spesial bagi mereka.

Selain hal-hal di atas yang telah disebutkan sebenarnya ada banyak sekali faktor yang lain yang membuat mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Karangrejo, salah satunya adalah menjaga peninggalan leluhur mereka salah satunya adalah tempat peribadatan mereka yakni Klenteng Hong Tong Bio yang menjadi saksi bisu sejarah perjalanan Etnis Tionghoa di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat kita lihat dari cara mereka menjaga dan menghormati Klenteng tertua di Banyuwangi ini. Banyak sekali kegiatan – kegiatan yang mereka lakukan di Klenteng ini, selain kegiatan Keagamaan mereka juga sering melakukan kegiatan bakti sosial seperti pembagian sembako untuk warga kurang mampu, lansia dan lain sebagainya.

Hal tersebut juga dapat menjadi bukti bahwa masyarakat Etnis Tionghoa memiliki rasa persatuan dan kesatuan dan rasa solidaritas yang kuat antar sesama tanpa memandang Suku, Ras, Etnis, dan Agama. Hal tersebut adalah salah satu hal yang perlu kita contoh dari mereka, kita yang sering menindas dan menghina mereka sebagai kaum minoritas yang hidup diantara kita harusnya dapat membuka hati dan menerima perbedaan. Karena jika dilihat dari sisi sejarah panjang mereka di negara ini sudah sepantasnya kita juga dapat menerima mereka sebagai bagian dari Etnis yang dapat disebut sebagai Pribumi bukan hanya sebagai pendatang bahkan penjajah seperti yang sering kita lakukan selama ini.

Kehidupan Etni Tionghoa Di Kabupaten Banyuwangi ditinjau Dari Aspek Sosial

Masyarakat Indonesia dikenal suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minang, suku Ambon, suku Bugis, dan lain-lain. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu mereka yang disebut dengan peranakan dan *totok*.

Disebut peranakan karena setelah mereka menetap selama beberapa waktu, mereka akhirnya menikah dengan perempuan pribumi. Dan ketika mereka memiliki keturunan maka mereka disebut sebagai Tionghoa Peranakan. Kebanyakan Peranakan adalah dari keturunan orang Hoklo (Hokkien), meskipun sejumlah yang cukup besar adalah dari keturunan orang Tiociu atau orang Kanton. Peranakan sendiri adalah

keturunan ras campuran, sebagian Tionghoa, sebagian Pribumi.

Masih banyak etnis Tionghoa Peranakan yang ditemukan di Indonesia sampai saat ini. Sebagai orang yang lahir dalam dua etnis yang berbeda, tentunya proses adaptasi selalu dilakukan bagi mereka ketika bersosialisasi dengan masing-masing etnis yang memiliki latar belakang yang jauh berbeda dan kesenjangan yang besar. Masalah utama dalam komunikasi antarbudaya adalah kesalahan dalam persepsi sosial yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan budaya yang mempengaruhi proses persepsi. Pemberian makna kepada pesan dalam banyak hal dipengaruhi oleh budaya penyandi balik pesan. Akibatnya, kesalahan-kesalahan gawat dalam makna mungkin timbul yang tidak dimaksudkan oleh pelaku-pelaku komunikasi. Kesalahan-kesalahan ini diakibatkan oleh orang-orang yang berlatar belakang berbeda dan tidak dapat memahami satu sama lainnya dengan akurat.

Banyaknya etnis di negara Indonesia, menjadikan sebagian besar masyarakat sangat sulit untuk memahami karakteristik dari masing-masing etnis secara mendetail dan terperinci. Ditambah lagi dengan adanya kecenderungan manusia untuk membagi dunia dengan dua kategori, yaitu kita dan mereka. Orang-orang yang dipersepsi sebagai kelompok di luar “kita” dipandang lebih mirip satu sama lain, karena “kita” kekurangan informasi mengenai “mereka”, kita cenderung menyamaratakannya dan menganggapnya homogen, serta menyandarkan diri pada *stereotip*.

Diskriminasi adalah kata kunci untuk aspek sosial yang berkaitan dengan Etnis Tionghoa, tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam segala aspek sosial Tionghoa kerap kali menjadi objek diskriminasi. Mulai dari hal kecil seperti sebutan sehari-hari sebagai “*pelit*” hingga menjerumus ke sebutan yang lebih ekstrim yakni Penjahat. Kata-kata seperti itu sudah tidaklah asing di telinga masyarakat untuk Etnis Tionghoa, dan terkesan sudah menjadi hal yang wajar dalam kalangan masyarakat kita seperti yang sudah kita bahas di atas hal tersebut dimulai sudah sejak dulu bahkan sejak era Kolonial Belanda, hal itu terjadi karena keijakan Belanda yang mengelompokkan golongan masyarakat menurut etnis, menimbulkan kecemburuan yang terus berkelanjutan hingga menjadi suatu hal yang menjerumus dapat memecah belah masyarakat karena memang dari awal itulah tujuan mereka agar bangsa ini semakin terpecah belah dan tidak dapat bersatu dan lepas dari penjajahan mereka.

Namun hal yang sangat disayangkan adalah kita tetap melanjutkan hal tersebut hingga saat ini, sehingga dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ini, hal yang perlu kita garis bawahi adalah Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai macam Ras, Suku, Bangsa, dan Agama. Bangsa yang terkenal dengan kerukunan dan persatuannya, yang sebenarnya hal tersebutlah yang menjadikan bangsa asing iri dan ingin menghancurkannya.

Jika kita mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan, kita kan menemukan nama-nama yang akan mengejutkan bahkan membuat kita heran dan bertanya – tanya, mengapa dan apa alanya. Nama seperti Yap Tjwang Bing, Djiaw Kie Song, Letnan Kolonel (Purn) Ong Tjong Bing, adalah sedikit dari nama-nama besar

Pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang membuktikan Eksistensi Tionghoa dalam membela kemerdekaan Indonesia, Pahlawan yang melepaskan belenggu penjajahan dari bangsa Indonesia, memang terdengar sangat aneh dan asing ditelinga kita karena dari sejak kita mulai mempelajari sejarah di sekolah kita memang tidak pernah diperkenalkan dengan nama nama tersebut, namun fakta sejarah telah membuktikan bahwa nama - nama tersebut adalah nama nama pahlawan yang harus kita ingat dan selalu kita hargai perjuangannya dalam memerdekakan bangsa ini.

Hal hal mendasar seperti itulah yang harus kita ingat bahwa ada darah Etnis Tionghoa agar Bendera Indonesia dapat berkibar di bumi pertiwi. Namun kita sengaja dibuat lupa dan seolah sengaja diadu domba dengan Etnis Tionghoa, etnis minoritas yang ikut memperjuangkan kemerdekaan kita. Saat ini kehidupan Etnis Tionghoa khususnya di wilayah Karangrejo sudah seperti kehidupan masyarakat pribumi Karangrejo pada umumnya. Jika kita melihat kehidupan sosial masyarakat Etnis Tionghoa kita tidak akan dapat membedakan dengan masyarakat pribumi yang membedakan hanya dari ciri fisik saja tidak lebih.

Etnis Tionghoa mempunyai eksistensi yang besar dalam bidang perekonomian di Indonesia. Dalam bidang pendidikan perannya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Dalam kehidupan sosial masyarakat, ada interaksi antara Tionghoa dan non-tionghoa. Interaksi tersebut biasanya terjadi pada sebagai penjual dan pembeli karena Tionghoa banyak yang bergerak di perdagangan. Untuk menjalankan perdagangannya perlu interaksi yang baik antara penjual dan pembeli. Toko milik Tionghoa terdapat dimana-mana, menjadikan hubungan simbiosis mutualisme antara Tionghoa dan non-Tionghoa. Dari usaha dagang terkecil seperti toko kelontong, hingga mall besar dimiliki oleh Tionghoa. Biasanya di tiap daerah Pasti ada Usaha dagang milik Tionghoa yang cukup lengkap dan besar yang menjadi tumpuan masyarakat sekitarnya dan juga memberikan lapangan pekerjaan kepada yang membutuhkan. Eksistensi Tionghoa sebagai pedagang yang sukses sudah sangat terkenal.

Eksistensi Tionghoa juga dapat dilihat dalam bidang komunikasi dengan hadirnya surat kabar Tionghoa yang terbit sejak tahun 1910 hingga akhirnya dibredel pada tahun 1965. Harian ini adalah harian pertama yang memuat teks lagu kebangsaan Indonesia Raya dan ikut mempelopori penggunaan "Indonesia" untuk menggantikan Hindia Belanda.

Ada juga kisah tentang Auw Tjoei Lan, Seorang wanita yang mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Beliau sudah aktif di dalam kegiatan sosial di Batavia sejak muda. Pada tahun 1914 beliau mendirikan lembaga sosial yang dinamakan Perkumpulan Hati Suci yang bertujuan untuk menjunjung tinggi derajat kebangsaan, memajukan pengajaran dan mermbantu ekonomi bumi putra. Kegiatannya adalah memajukan kehidupan perempuan, menyantuni anak yatim, anak terlantar, hingga menampung Wanita Tuna Susila yang terpaksa menjual diri karena kondisi ekonomi. Pada tahun 1929 Auw Tjoei Lan mendirikan

Hati Suci di daerah Kebon Sirih yang kemudian berkembang menjadi panti asuhan yang dapat menampung 200 anak.

Dalam hubungan sosialnya, Mereka juga ada yang bergaul dengan etnis yang bukan Tionghoa, tidak hanya dengan sesama etnisnya saja. Seperti kegiatan arisan di lingkungan tempat tinggalnya. Tidak semua Tionghoa tinggal di wilayah yang penduduknya semua Tionghoa, walaupun kebanyakan mereka tinggal di suatu wilayah yang diberi nama pecinan. Tionghoa yang tinggal di luar pecinan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan ikut dalam kegiatan bersama-sama dengan non-Tionghoa. Kegiatan yang diikuti seperti bakti sosial, siskamling (sistem keamanan lingkungan), perayaan hari besar keagamaan, undangan pernikahan dan acara kematian.

Hal itu berarti bahwa eksistensi Tionghoa sudah terlihat sejak sebelum Indonesia merdeka dengan adanya interaksi antara Tionghoa dengan masyarakat sekitar atau non-Tionghoa. Hal tersebut diperjelas pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada masa pemerintahannya tersebut Gus Dur memperjuangkan tentang kewarganegaraan keturunan Tionghoa di Indonesia. Gus Dur mencabut instruksi presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Pada 17 Januari 2000 yang isinya Semua Orang Tionghoa bisa merayakan hari besar mereka seperti imlek secara terbuka. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Megawati, peringatan hari raya Imlek mulai diberlakukan sebagai hari libur nasional. Presiden Megawati menyampaikan penetapan tersebut saat menghadiri peringatan nasional Tahun Baru Imlek 2553 pada 17 Februari 2002. Penetapan Imlek sebagai hari libur nasional mulai dilakukan sejak tahun 2003.

Bagi etnis Tionghoa, Gus Dur dinilai telah menghapus kekangan, tekanan dan prasangka. Pada masa lalu mereka selalu mendapatkan stigma buruk baik dari Pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya. Dapat Dilihat dengan tumbanganya orde baru dan munculnya periode politik yang demokrasi di Indonesia telah memberikan informasi yang sebenarnya tentang beragamnya ekspresi identitas dalam etnis Tionghoa. Mereka dapat dibedakan dalam berbagai kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, pendidikan, agama, tempat , asal daerah yang kemudian meruntuhkan stereotip yang menganggap masyarakat Tionghoa Indonesia homogen. Terutama jika ditinjau dari aspek ekonomi, karena pada kenyataannya tidak semua Tionghoa kaya dan tinggal di daerah mewah. Masih ada Tionghoa yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tinggal di daerah *slum* sama saja seperti masyarakat lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisa menemukan beberapa pola interaksi yang terlihat dalam interaksi sosial yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi di Kelurahan Karangrejo dalam usahanya bertahan dan mensejahterakan

hidupnya dan keluarganya, sebagian besar etnis Tionghoa di Karangrejo menggantungkan hidupnya dalam sektor perdagangan.. Interaksi yang terjadi antara kedua kelompok sosial tersebut berjalan dengan baik, hal ini terjadi karena adanya faktor saling membutuhkan antara keduanya hingga terjadi interaksi sosial yang saling menguntungkan.

Di Kelurahan Karangrejo terdapat Klenteng tertua dan menyimpan sejarah panjang etnis Tionghoa maka sangatlah wajar jika mereka memilih untuk tetap berdomisili di wilayah tersebut, Juga ada banyak faktor yang mendasari keputusan tersebut, antara lain alasan tempat kelahiran karena mayotitas tinggal di kelurahan Karangrejo, alasan ekonomi daerah ini salah satu pusat perdagangan, masyarakat Etnis Tionghoa yang hidup membaaur sudah sejak lama dengan masyarakat sekitar tentu juga memiliki rasa persaudaraan yg kuat

Masyarakat Tionghoa di Karangrejo ditinjau aspek social, pada umumnya sudah lancar berbahasa jawa, dalam berkomunikasi dengan masyarakat pribumi bahkan dengan sesama Tionghoa sehari-hari sering menggunakan bahasa jawa. Dengan intensitas pertemuan yang terjadi antara kedua kelompok sosial tersebut memunculkan sebuah fenomena akulturasi kedua kebudayaan yang berbeda. Namun fenomena tersebut tidak menghilangkan ciri atau sifat asli dari masing- masing kebudayaan. Etnis Tionghoa tidak kehilangan ciri ke Tionghoannya begitu pula dengan masyarakat pribumi tidak kehilangan ciri ke Jawaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darajadi, 2013. *Geger Pacinan : Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- Groeneveldt, W.,P. 2009. *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Hidajat. 1977. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*. Bandung: Penerbit Tarsito
- Justian, S. 2009. *WNI Keturunan Cina dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Ningtyas, I. 2015. *Hong Tong Bio : Kisah Klenteng Tertua di Ujung Jawa Timur 1965 – 2014*. Banyuwangi : Perempuan Bertutur.
- Onghokham. 2008. *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Samsibur. 2011. *Sejarah Kerajaan Blambangan*. Surabaya: Paramita.